

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat (AS) dengan Israel memiliki hubungan yang erat sejak lama. AS menjadi negara yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel, bahkan hingga ke permasalahan pertikaian pun tetap didukung oleh AS. Secara historis, hubungan kedua negara sudah ada sejak masa benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus. Israel melakukan kontak pertama dengan Amerika melalui pembentukan Zionis. Terdapat peristiwa pengusiran 300.000 orang Yahudi oleh Spanyol. Columbus mengadakan perjalanan ke lautan Barat. Orang-orang Yahudi yang terusir bergabung dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Columbus. Sejak itu orang-orang Yahudi menjalin hubungan dekat dengan Columbus. Berdasarkan catatan perjalanannya, hal ini menjadi faktor utama awal kedekatan Yahudi dengan Amerika. Para Yahudi secara tidak langsung memiliki peran dalam menemukan benua Amerika.

Hubungan terus meningkat ketika masa kepemimpinan Presiden Reagan di tahun 1980-an. Banyak perjanjian yang dibuat dan melibatkan Israel didalamnya, salah satunya perjanjian perdagangan bebas di tahun 1985. Amerika juga seringkali memberikan hibah pada Israel tanpa melalui perjanjian atau persyaratan tertentu. Pada 11 September 1922 senator dan kongres Amerika Serikat memberi dukungan pada berdirinya negara Israel diatas tanah Palestina. Terjadi juga Konferensi Zionis Internasional yang dilaksanakan di Hotel Baltimore, New York yang bertujuan untuk mengubah Palestina menjadi negara Yahudi dan mengusir warga Arab yang tinggal di Palestina pada 11 Mei

1942 (Sona, 2011). Hubungan ini terus beriringan hingga presiden selanjut-selanjutnya dilantik.

Kaum Yahudi memiliki peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan Amerika Serikat. Konsep kapitalisme yang disebarkan oleh Amerika Serikat merupakan salah satu produk kaum Yahudi yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan ekonomi yang kuat (Setiowati, 2009). Kaum Yahudi menguasai industri-industri di Amerika Serikat maupun dunia. Beberapa industri Amerika yang dikuasai kaum Yahudi diantaranya adalah industri perfilman, industri tiket, industri makanan dan minuman, industri perhiasan dan lain sebagainya. Tidak hanya bidang industri yang mereka kuasai, bidang pemerintahan juga menjadi arena permainan bagi kaum Yahudi. Kaum Yahudi menguasai pemerintahan Amerika Serikat melalui Kongres Amerika. Keterlibatan Yahudi dalam pemerintahan Amerika Serikat dikenal dengan sebutan lobi Yahudi.

Salah satu kelompok kepentingan Yahudi yang memiliki pengaruh terbesar dalam pemerintahan Amerika Serikat yaitu AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*). AIPAC dibentuk pada tahun 1951 pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower. AIPAC adalah sebuah kelompok kepentingan yahudi yang memusatkan kepentingannya kepada negara Israel agar setiap kebijakan Amerika Serikat tidak bertentangan dengan kepentingan negara Israel sebagai negara sekutu Amerika Serikat. Awalnya kelompok ini kurang begitu berkembang. Saat ini AIPAC telah menjadi kelompok kepentingan terkuat yang dapat mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan di Gedung Putih. Peran AIPAC sangat terlihat jelas dalam politik dan pemerintahan Amerika Serikat.

Selain mampu mempengaruhi anggota Kongres dan para Senator, AIPAC juga berperan penting dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Dalam setiap pemilihan umum, AIPAC akan mendukung kandidat yang dianggap memihak kepada negara zionis Israel. Dukungan AIPAC kepada

kandidat yang akan terpilih dapat berupa dukungan dana kampanye maupun dukungan suara. Sebaliknya jika ada kandidat yang mengkritik Israel maka dapat dipastikan kandidat tersebut tidak dapat maju ke langkah berikutnya (Zubir, 2011). AIPAC bergerak mulai dari departemen eksekutif negara hingga di kongresnya. Dengan anggota yang kini mencapai kurang lebih 100.000 orang yang tersebar di 17 kantor dan didukung oleh jaringan donor yang luas, AIPAC adalah salah satu grup lobi terkuat di Amerika Serikat. AIPAC mendapat dukungan cukup besar dari para politisi Yahudi di Partai Republik dan Partai Demokrat.

Saking kuatnya pengaruh AIPAC di kalangan politisi elit Amerika Serikat, dalam konferensi tahun lalu tak hanya Trump yang hadir, tapi juga Hillary Clinton, mantan Wakil Presiden Joe Biden, dan Ketua Dewan Legislatif, Paul Ryan. Dulu sempat ada anggapan bahwa AIPAC mendapat dukungan kuat dari kubu Republikan saja, tapi hal ini disanggah AIPAC sebab mereka juga dekat dengan organisasi pro-kepentingan Israel di Amerika Serikat yang berhalauan liberal, J Street. Dalam pelaksanaannya, anggota AIPAC bertemu secara rutin dengan anggota Kongres AS, biasanya dengan cara menyelenggarakan sebuah acara khusus, dan mengundang politisi yang akan dilobi-lobi. Jika lobi berhasil, si politisi diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi AIPAC di kongres hingga dapat menjadi sebuah undang-undang. Salah satu undang-undang penting yang sejumlah pengamat politik nilai sebagai keberhasilan penting bagi lobi AIPAC adalah terbitnya *Jerusalem Embassy Act* tahun 1995. Isinya memerintahkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem paling lambat 31 Mei 1999. Pemerintah Amerika Serikat juga mesti membantu 50 persen dana pemindahan. Langkah ini adalah simbol dari pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh pemerintah Amerika Serikat.

Menurut laporan *Fortune*, AIPAC terhubung secara longgar dengan Political Action Committee (PACs), organisasi

yang berisi para kontributor dan pendonor dana untuk menggelar kampanye baik untuk mendukung maupun menentang pencalonan kandidat, inisiatif pemungutan suara dan undang-undang. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang memiliki upaya lobi menggunakan pelobi profesional yang mampu memberikan pengaruh kepada para pejabat Kongres AS untuk melindungi kepentingan Israel. Organisasi ini memiliki perwakilan di seluruh penjuru AS yang dapat melobi anggota Kongres dari distrik asal mereka. Anggota AIPAC adalah para pelobi yang terdiri dari politisi dan tokoh Yahudi untuk memperkuat hubungan antara AS dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv. AIPAC dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan donor yang bersedia menyumbangkan dananya untuk kampanye pencalonan, walaupun AIPAC tidak berkontribusi langsung terhadap pencalonan kandidat capres AS, dan tidak juga memberikan dana kepada PACs yang mendukung pencalonan masing-masing capres. Dalam siklus kampanye 2016 tercatat menurut data dari *Open Secrets* sebanyak US\$7.168.396 disumbangkan untuk kampanye federal dari sejumlah individu pro-Israel dan berbagai PACs. Sementara pada siklus kampanye 2012, sebanyak US\$15.102.201 disumbangkan dari kelompok tersebut.

Dibandingkan dengan AIPAC, sejumlah organisasi pelobi Yahudi lainnya, seperti *Jewish Voice for Peace* dan *J Street* yang muncul belakangan ini sangat kecil pengaruhnya dibandingkan dengan AIPAC. Bila pejabat Kongres telah menerima telepon dari pelobi AIPAC, mereka tidak berpikir bahwa mereka mendukung hubungan dengan Israel. Mereka hanya akan berpikir jika mereka akan mendapatkan suara dengan lobi politik yang menguntungkan. Tetapi apabila pejabat Kongres menolak lobi dari AIPAC, mereka akan mendapatkan musuh politik yang kuat. Menghadiri konferensi AIPAC dianggap sebagai hal yang penting bagi kandidat calon presiden AS (Sari, 2016).

Donald John Trump merupakan Presiden Amerika Serikat ke-45 menggantikan presiden yang dua periode menjabat yaitu Barrack Husein Obama. Dirinya resmi dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Januari 2017. Sebelum menjadi Presiden, Trump sudah dikenal sebagai milyarder dan pebisnis real-estat. Semenjak masa kampanye berlangsung, Trump memang dikenal penuh kontroversi dibandingkan dengan saingannya kala itu, Hillary Clinton. Presiden Trump berasal dari partai Republik. Dalam janji kampanyenya, Trump sudah membuat pernyataan dukungan kepada pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel “yang tak terbagi”. Disini dilihat bahwa ini merupakan kekuatan lobi dari pada kaum Yahudi terhadap Trump sangatlah berpengaruh (Hasan, 2017). Trump secara terbuka juga telah mengatakan bahwa dirinya mendukung 100 persen, sebagai salah satu bentuk komitmen hubungan baik antara Washington dan Israel (Kompas.com, 2017).

Trump memberikan beberapa contoh dukungannya terhadap Israel saat masa-masa kampanye. Trump pernah berkontribusi dengan meminjamkan pesawat pribadinya untuk walikota New York saat itu, Rudy Giuliani, untuk terbang ke Israel beberapa minggu setelah serangan 9/11 tahun 2001. Dia juga menambahkan jika putrinya, Ivanka, akan segera melahirkan anak dari hasil pernikahannya dengan pengusaha Yahudi, Jared Kushner. Selain itu Trump mengaku pernah mengikuti parade "*Salute to Israel*" pada 2004 di New York, di tengah bentrokan antara Israel dan Palestina. Trump menilai PBB "lemah dan tidak kompeten" dalam hal konflik Israel-Palestina. Jika Trump terpilih menjadi presiden AS, Trump mengaku akan memveto seluruh upaya PBB untuk menekan Israel. Trump juga mendapat atensi saat mengatakan akan memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia juga mengaku mengenal Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mengatakan bisa bekerja sama untuk membawa stabilitas dan perdamaian dengan perdana menteri Israel itu (Armandhanu, 2016).

Pada bulan Juni 2017, Trump menandatangani surat penundaan pemindahan yang berlaku setiap enam bulan, yang akan memenuhi usaha-usaha AS untuk melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel-Palestina yang telah lama terhenti. Masa berlaku surat penundaan tersebut akan habis pada tanggal 1 Desember 2017. Masyarakat internasional tidak mengakui yurisdiksi dan kepemilikan Israel atas kota tersebut (Mata Mata Politik, 2017). Hingga akhirnya pada Mei 2018 sudah resmi dipindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem bertepatan dengan hari jadi negara Israel. Untuk sebuah kelompok kepentingan, AIPAC memiliki kekuatan besar untuk bisa benar-benar ikut campur dalam pengambilan keputusan tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana cara *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) memengaruhi proses kebijakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump?”

III. KERANGKA TEORI

1. Konsep Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Kelompok penekan atau dalam nama lainnya biasa disebut sebagai *political advocacy group*, *special-interest group*, *interest group*, atau *lobbyist group*. Menurut Gabriel Almond mendefinisikannya sebagai organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok penekan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui kepentingan masyarakat umum dan masyarakat luas dengan harap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kepada kelompoknya. Kelompok penekan terinstitusionalisasi dan lebih politis dalam menyuarakan kepentingannya, fokus pada satu isu saja, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu tertentu (McNair, 1999:9). Di Eropa Barat, kelompok penekan bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik yaitu partai “Hijau”. Partai ini berhasil meraih simpati besar dengan berhasil mendudukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif di Jerman dan beberapa negara lain di Eropa (Junaedi, 2010).

Menurut Maurice Duverger, kelompok kepentingan tidak secara langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri.

Mereka bertindak untuk memengaruhi kekuasaan tanpa terlibat dialamnya, mereka melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan. Kelompok ini adalah sekelompok orang pemikir, mereka terbiasa mengadakan diskusi mengevaluasi keadaan negara, mengkritik jalannya pemerintahan, menuangkan gagasan-gagasan perbaikan keadaan, kemudian hasil pemikirannya yang berupa kritik-kritik tajam, sering disampaikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Hasil pemikiran tersebut memiliki dampak luas pada perubahan opini masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah mulai memperhitungkan pengaruh kelompok pemikir ini, maka kelompok pemikir demikian ini bisa juga dikatakan sebagai memiliki kekuatan politik kolektif informal (Zubir, 2011).

Kelompok penekan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi, bahkan lebih berpengaruh dalam mengambil keputusan daripada institusi pengambil keputusan formal (resmi). Ini terjadi karena pada kenyataannya pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan sangatlah kecil. Maka untuk memuaskan kebutuhan, individu-individu akan menggabungkan kekuatan kedalam sebuah kelompok penekan. Negara bersistemkan demokrasi menjadi tempat yang baik untuk kelompok kepentingan bisa berkembang karena kelompok kepentingan dapat menjadi wadah penyalur suara masyarakat, dengan sistem pemerintahan demokrasi masyarakat yang memiliki kepentingan atau ingin menyampaikan suaranya. Bergabung membentuk kelompok penekan menjadi cara yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan.

Adapun tujuan dari kelompok penekan menurut Gabriel Almond yaitu:

1. Melindungi kepentingan anggota kelompok dari adanya dominasi dan penyelewengan pemerintah atau negara
2. Wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan

3. Wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pengawasan tugas dan fungsi pemerintah dan negara
4. Menjadi wadah kajian dan analisa bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan

Beberapa sifat kelompok penekan menurut Gabriel Almond yaitu :

1. Independen

Bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran dan lain-lain dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.

2. Netral

Bahwa dalam menjalankan eksistensinya tidak tergantung pada pihak lain.

3. Kritis

Bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sah.

4. Mandiri

Bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas (Universitas Brawijaya, 2012).

Dalam sistem negara demokrasi, kelompok penekan baik politik atau ekonomi, punya kemampuan untuk mempengaruhi, di tingkat kebijakan maupun keputusan, demi keuntungan mereka sendiri, sekaligus berupaya mendapat pengaruh melalui sistem. Mereka dapat mendirikan partai

politik, dengan program kerja dan ideologi yang kemudian ditawarkan ke masyarakat. Di sistem Inggris kelompok penekan bisa memperoleh banyak kesulitan karena para pembuat keputusan sudah memiliki sendiri sumber kekuasaan seperti disiplin partai yang kuat atau terjaminnya jabatan karier sedangkan di Amerika para pembuat keputusan yang jumlahnya jauh lebih banyak dan terpencar-pencar itu lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok penekan. Dalam sistem Inggris, kelompok pendesak hanya perlu mempengaruhi kelompok pembuat kebijaksanaan yang terdiri dari politisi-politisi anggota cabinet dan pegawai pemerintah senior di kementerian (Hutagalung).

Gabriel A. Almond juga membagi kelompok penekan kedalam empat macam, yaitu: Kelompok Anomik, Kelompok Non-Assosional, Kelompok Institusional, Kelompok Assosional.

A. Kelompok kepentingan Anomik

Berasal dari kata *anomie* yang artinya terasing. Kelompok anomik muncul secara kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur.

B. Kelompok kepentingan Non- Asosiasional

Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini, muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang relative longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban, dan kurang begitu efektif.

C. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)

Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

D. Kelompok Kepentingan Asosiasional

Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga profesional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus. Efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dari keempat macam kelompok kepentingan tersebut, AIPAC termasuk kedalam kelompok kepentingan Asosiasional. Kelompok kepentingan Asosiasional merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang kuat dan bersifat formal. Kelompok kepentingan ini dalam memperoleh pendukung-pendukungnya juga melalui prosedur formal. Taktik dan tujuan kelompok kepentingan ini sering diakui sah dalam masyarakat, kelompok kepentingan jenis ini juga bisa membatasi kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Kelompok Asosional memiliki berbagai taktik dan cara mengorganisir pengaruh mereka untuk dapat mempengaruhi pejabat pemerintah, perusahaan-perusahaan Yahudi terkemuka, anggota Kongres, bahkan juga dapat mempengaruhi keputusan Presiden Amerika Serikat.

Sebagai contoh kasus, pada pasca perang 1973, kedua Presiden Gerald Ford (1974-1977) dan Jimmy Carter (1977-1981), yang mana kedua presiden tersebut berasal dari partai yang berbeda pernah mencoba merumuskan kebijakan baru

yang lebih berimbang terhadap Israel dan Palestina. Namun, kelompok kepentingan Pro-Israel (AIPAC) tidak setuju dan menentang kebijakan tersebut. Akhirnya, kebijakan itu dapat di gagalkan karena adanya pertentangan dari mayoritas anggota Kongres, baik Republik maupun Demokrat, yang dimobilisasi AIPAC.

Dalam mempergunakan pengaruh politiknya, kelompok penekan mempergunakan tiga sumber kekuatan yaitu kekuatan finansial, jumlah anggota, dan pengetahuan. Sedangkan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara mobilisasi opini publik, kampanye, dan promosi, menyokong kandidat-kandidat calon politik, mempublikasi opini-opini, dan mensponsori pertemuan testimonial dengan makan malam.

Kelompok kepentingan pertama kali muncul di Amerika Serikat khususnya tahun 1830-1860 sebagai kelompok yang memperjuangkan gerakan anti perbudakan, dan kelompok bisnis yang mendukung kepentingan perusahaan minyak. Kelompok kepentingan memiliki berbagai metode untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Cara-cara yang dilakukannya berupa lobi, aksi langsung berupa protes, dan kontribusi secara finansial untuk kampanye melalui *Political Action Committee* (PACs).

Di Amerika Serikat sendiri, kelompok kepentingan mencari perhatian untuk ikut campur terhadap Kongres, terkadang menciptakan hubungan segitiga erat yang terdiri dari kelompok kepentingan, sub-komite kongres, dan agensi pemerintahan. Kelompok kepentingan lebih lanjut menggunakan Mahkamah Agung terhadap ikhtisar *amicus curiae*, kertas putih, atau aksi legal (Sullivan, 2009). Kelompok kepentingan dibagi atas beberapa kategori berdasarkan gerakan atau anggotanya. Beberapa grup merepresentasikan isu tunggal, seperti anak, kesejahteraan hewan, advokasi konsumen, atau imigrasi. Beberapa kelompok lain merepresentasikan asosiasi dagang, seperti *National*

Education Association, atau persatuan dagang seperti AFLCIO. Lainnya merepresentasikan perusahaan yang secara khusus meningkatkan profit seperti pajak, perlindungan lingkungan, dan kebijakan perdagangan. Kelompok kepentingan perdagangan tidak memiliki anggota dari luar. Keberaan kelompok penekan di Amerika Serikat diukung oleh undang-undang mengenai lobi yaitu *The Federal Regulation of Lobbying Act of 1946* (FRLA 1946) atau undang-undang yang mengatur kegiatan lobi domestik.

Dari keterangan konsep tersebut, bisa dikatakan AIPAC adalah kelompok penekan yang kegiatannya sudah diatur dalam FRLA 1946 di dalam undang-undang Amerika Serikat. AIPAC mengklaim bahwa mereka memiliki kekuatan finansial yang kuat, jumlah anggota yang banyak, dan memiliki pengetahuan yang handal dalam melobi. Kapasitas tersebut membuat AIPAC dapat melakukan lobi dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat .

2. Konsep Lobi (*Lobbying*)

Menurut Anthony J. Nownes dalam bukunya “*Total Lobbying, What Lobbyists Want (And How They Try To Get It)*”, lobi adalah sebuah usaha untuk memengaruhi pemerintah (Nownes, 2016). Orang yang melakukan lobi disebut *lobbyist*. Buku ini menjelaskan beberapa teknik lobi yang biasa dilakukan di Amerika Serikat, diantaranya: *Legislative Lobbying, Executive Lobbying, Judicial Lobbying, Grassroot* atau *Indirect Lobbying, Electoral Lobbying*, dan *Join Coalition Lobbying*.

1. Legislative Lobbying

Legislatif memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang memngaruhi kepentingan yang terorganisir. Lobi legislative dilakukan dalam beberapa cara. Pertama para lobbyist bersaksi dalam audiensi legislative. Audiensi

legislative adalah forum yang ideal untuk menyampaikan pandangan mereka kepada legislator. Kedua, para pelobi bertemu secara pribadi dengan legislator atau asisten mereka. Parpelobi biasanya bertemu di kantor pribadi legislator, gedung pemerintahan, atau di tempat non formal seperti restoran dan bar. Pertemuan ini lebih memberikan kesempatan pelobi untuk menajikan informasi secara detail. Ketiga, tidak jarang juga para pelobi ini menawarkan bantuan atau menyediakan hadiah untuk legislator.

2. Executive Lobbying

Lobi eksekutif ini ditujukan pada kepala eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Walikota, dan birokrasi eksekutif lainnya. Teknik ini sering dilakukan karena sasaran lobi tersebut memiliki kekuatan lebih untuk membuat suatu kebijakan. Para pelobi melakukan aksinya dengan cara bertemu secara pribadi dengan para eksekutif atau wakilnya, dan juga dengan cara berinteraksi dengan kantor penghubung atau penasihat khusus yang terletak di dalam kantor eksekutif tersebut.

3. Judicial Lobbying

Para pelobi juga mengincar pengadilan. Mereka akan terlibat dalam litigasi dengan membawa gugatan-gugatan untuk mencari perubahan kebijakan atau menghentikan kebijakan tersebut. Lalu para pelobi ini mengirimkan briefing amicus curiae (“teman pengadilan”) agar memjelaskan pandangannya terhadap implikasi keputusan dan nilai penting dari keputusan tersebut. Hingga para pelobi tersebut berusaha memengaruhi pemilihan dalam pengadilan.

4. Grassroot atau Indirect Lobbying

Lobi akar rumput ditujukan untuk warga Negara biasa dengan cara memobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam cara-cara yang ditentukan sehingga suara mereka dapat didengar oleh pemerintah. Hal tersebut juga dapat menunjukkan kepada pemerintah bahwa banyak orang yang memiliki pandangan terhadap kebijakan dan pemerintah harus

mengindahkan pandangan tersebut. Para pemilik kepentingan tersebut akan merancang surel, surat, telegram, atau telepon kampanye pada aparat pemerintah. Selanjutnya mereka akan merancang pertemuan langsung antara pendukung atau massa dengan pemerintah. Para massa pendukung juga memasang iklan di media, bahkan melakukan aksi demo atau protes. Terakhir mereka menyediakan juru bicara di media untuk mendapatkan dukungan publik lebih banyak.

5. Electoral Lobbying

Para aparat pemerintah mendapatkan jabatannya berdasarkan hasil kemenangan pemilu. Pemilik kepentingan memiliki peran dalam proses pemilu tersebut terutama dalam kampanye. Para pemilik kepentingan tersebut berkontribusi **penuh** pada kandidat melalui *Political Action Committees* (PACs). Kontribusi tersebut bias berupa bentuk dana kampanye, namun harus melalui perantara PACs. Para pendukung kandidat dilarang memberikan dana langsung terhadap calon-calon legislator. PACs sudah dianggap resmi dalam bawah ranah hukum. Jumlah dana yang diberikan masing-masingnya diberi batasan. Bentuk lain dukungan tersebut juga bias melalui jasa iklan, konsultasi, percetakan, maupun sumbangan berupa barang lain.

Para pemilik kepentingan akan melakukan kampanye untuk mendukung ataupun melawakan kandidat melalui media, surat, ataupun telepon. Kampanye tersebut menyerukan kelebihan atau kekurangan dari para calon kandidat politik tergantung dengan kepentingannya. Hal tersebut dikenal sebagai masalah advokasi pemilu. Selanjutnya para kandidat politik tersebut memobilisasi aktivis untuk bekerja mendukung kandidat. Para pemilik kepentingan melalui PACs selanjutnya memberikan dana untuk kantor public. Setelah itu para pemilik kepentingan tersebut memberikan arahan pada pemilih akan keberpihakan dan focus masalah utama dari para kandidat politik tersebut. Hingga terakhir para pemilik kepentingan ini melakukan lobi dengan cara berkontribusi dalam partai-partai politiknya.

6. *Join Coalition Lobbying*

Metode ini adalah metode lobi dengan cara gabungan koalisi antara satu pemilik kepentingan dengan pemilik kepentingan lain. Metode tersebut diyakini para pelobi jika mereka memiliki beragam kepentingan lain yang disatukan didalamnya maka akan lebih mudah mendapatkan keinginannya dari pemerintah. Ketika koalisi dibuat, itu akan membentuk kesatuan beberapa teknik lobi.

AIPAC dalam kegiatan lobinya menggunakan teknik-teknik lobi sebagai berikut:

- Teknik Koalisi (*Coalition Organization*) adalah teknik yang digunakan untuk mencari individu atau kelompok yang memiliki ideology yang sama dengan AIPAC.
- Teknik lobi langsung (*Direct Lobbying*) yaitu teknik lobi dengan cara pertemuan langsung dengan para anggota kongres, pejabat tinggi pemerintahan, diplomat, dan para politikus untuk membicarakan mengenai hubungan AS dengan Israel yang biasa disebut Konferensi AIPAC (*The Annual Policy Conference*).

IV. HIPOTESIS

Di penelitian ini penulis memiliki argumen bahwa AIPAC menekan percepatan realisasi kebijakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem dengan cara lobi simultan dari masa kampanye hingga Presiden Trump memutuskan kebijakan tersebut.

V. METODE PENELITIAN

a) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai:

- a. Melengkapi tugas akhir kuliah di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan penjelasan bagaimana pengaruh AIPAC terhadap kebijakan pemindahan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem di era Donald Trump.

b) Batasan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki jangkauan penelitian dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Tahun tersebut terhitung dari masa kampanye calon presiden Amerika Serikat hingga diresmikannya pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

c) Metode Penelitian

i. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pemberitaan berbagai media massa tentang kebijakan negeri Amerika Serikat terhadap Israel, tulisan-tulisan dari para praktisi dan akademisi, keputusan Presiden, naskah-naskah resmi, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Unit analisis dari penelitian ini adalah AIPAC yang ada dalam tingkatan organisasi.

ii. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (UPI, 2009). Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab, yakni:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori atau konsep, argumen utama serta sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai AIPAC sebagai kelompok kepentingan di Amerika Serikat.

BAB III menjelaskan kebijakan Amerika Serikat terhadap perpindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem.

BAB IV menjelaskan bagaimana pengaruh AIPAC terhadap kebijakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem pada era Presiden Trump.

BAB V sebagai penutup, akan memberikan kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni simpulan singkat dari latar belakang hubungan Amerika Serikat dengan Israel, terbentuknya AIPAC, pengaruh AIPAC di Amerika Serikat sekaligus juga penjelasan bagaimana AIPAC bisa memiliki pengaruh pada Keputusan Presiden Donald Trump untuk

memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel ke Yerusalem.

